




### THE IMPACT OF MONETARY POLICY ON LABOR ABSORPTION IN EAST NUSA TENGGARA USING THE ERROR CORRECTION MODEL (ECM) METHOD

Chiny Wilhelmina Mau<sup>1</sup>, Maria I. Hewe Tiwu<sup>2</sup>, Olivia L. E. Tomasowa<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Bandung, Bandung (40614)

\* Corresponding Author: Vivayani.W.Dewanti@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Articles History:</b>            Accepted tgl. 26/05/2025            Repaired tgl. 27/05/2025            Approved tgl. 27/05/2025            Available online tgl. 28/05/2025</p>	<p>This study aims to estimate the effect of interest rates on labor absorption, the effect of inflation on labor absorption, and the exchange rate on labor absorption in East Nusa Tenggara in 2000-2023 using the Error Correction Model (ECM) method. The results of the study indicate that in the short term, interest rates and exchange rates do not affect labor absorption. While inflation affects labor absorption. Meanwhile, in the long term, each independent variable affects labor absorption. Therefore, to encourage optimal labor absorption, especially in areas such as East Nusa Tenggara, synergy is needed between monetary, fiscal, and sectoral policies supported by structural reform, appropriate inflation control, and strengthening of labor-intensive sectors and MSMEs.</p>
<p>ISSN-E: 2962-4746            ISSN-P: 2961-8312</p>	
<p><b>DOI:</b>            10.58290/jmbo.v4i1.407</p>	<p><b>Kata Kunci:</b>            Kebijakan Moneter, Tenaga Kerja, Metode Error Correction Model</p>
<p> ©2025. Published By Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). This article is open access under the Creative Commons Attribution License CC BY (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a>)</p>	

#### PENDAHULUAN

Kebijakan moneter merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Melalui pengendalian inflasi, suku bunga, dan nilai tukar, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU

No. 4 Tahun 2023 (Perry & Solikin, 2003). Berbagai instrumen moneter seperti suku bunga acuan (*BI Rate/BI7DRR*), Operasi Pasar Terbuka (OPT), dan Giro Wajib Minimum (GWM) digunakan untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja.

Berdasarkan penelitian (Mahadika & Wibowo, 2021) yang berjudul “*The Effect Of Monetary Policy On Unemployment Rate In Indonesia*” kebijakan moneter memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan

tenaga kerja. Dalam jangka pendek, suku bunga riil dan nilai tukar riil menunjukkan pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang berarti bahwa kebijakan moneter ekspansif melalui penurunan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar dapat meningkatkan investasi dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, dalam jangka panjang, penelitian ini menunjukkan bahwa suku bunga riil tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang menandakan bahwa dampak kebijakan moneter terhadap tenaga kerja bersifat sementara dan memerlukan dukungan kebijakan fiskal untuk mencapai hasil yang lebih berkelanjutan.

Dampak dari kebijakan moneter yang ada di setiap daerah pasti berbeda, tergantung pada struktur ekonomi, tingkat literasi keuangan, serta dominasi sektor formal atau informal. Salah satu daerah dengan karakteristik ekonomi unik adalah Nusa Tenggara Timur (NTT), yang masih bergantung pada sektor informal dan menghadapi keterbatasan akses terhadap kredit serta modal usaha. Berbeda dengan wilayah industri yang lebih responsif terhadap perubahan kebijakan moneter, NTT lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi akibat ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan skala kecil.

**Tabel 1. Data Suku bunga, Inflasi dan Nilai tukar pada Periode 2019-2023**

Tahun	Suku Bunga (BI Rate)	Inflasi	Nilai Tukar (Exchange Rate)
2019	5,00	0,67	14,147.7
2020	3,75	0,61	14,582.2
2021	3,50	1,67	14,308.1
2022	5,50	6,65	14,849.9
2023	6,00	2,42	15,236.9

Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pada periode 2019-2023 menunjukkan bahwa suku bunga acuan mengalami perubahan signifikan, turun dari 5,00% (2019) menjadi 3,50% (2021), Kemudian meningkat kembali menjadi 6,00% (2023), kenaikan tersebut disebabkan oleh keputusan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar. lalu Inflasi di NTT yang juga mengalami kenaikan dari 1,67% (2021) ke 6,65% (2022) dikarenakan kenaikan indeks harga pada 7 dari 11 kelompok pengeluaran yang merupakan gabungan dari 3 kota di NTT yaitu Kota Kupang, Maumere, dan Waingapu sebelum turun ke 2,42% (2023).

Nilai tukar Rupiah pun mengalami fluktuasi mulai dari Rp14,147.7 per USD (2019) hingga pada akhirnya menguat di kisaran Rp15,236.9 per USD (2023) dikarenakan pelemahan nilai tukar USD yang terjadi akibat fluktuasi di pasar global termasuk dampak dari eskalasi konflik antara Israel dan Hamas yang semakin meluas. Perubahan-perubahan ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, akses kredit, serta penyerapan tenaga kerja di Nusa

Tenggara Timur.

Peningkatan suku bunga menyebabkan naiknya biaya pinjaman, yang membatasi akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan petani di NTT. Dengan keterbatasan modal, petani tidak dapat membeli pupuk dan alat pertanian yang memadai, sementara pelaku usaha kecil menunda ekspansi bisnis. Hal ini berdampak pada penurunan produksi, berkurangnya peluang kerja, dan meningkatnya angka pengangguran (Todaro & Smith, 2013). Selain itu, inflasi yang tinggi juga mengurangi daya beli masyarakat, menekan permintaan terhadap barang dan jasa, serta memperlambat pertumbuhan sektor usaha.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT menunjukkan bahwa pada tahun 2023, angka migrasi keluar mencapai 3.086 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa keterbatasan lapangan kerja di NTT memaksa masyarakat, terutama tenaga kerja muda untuk mencari peluang di luar daerah. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTT pada 2023 tercatat sebesar 3,14%, dengan sekitar 75,72% tenaga kerja pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia turut memperburuk situasi ketenagakerjaan, di mana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT menempati peringkat ke-32 dari 34 provinsi di Indonesia sejak tahun 2010 hingga 2023 (BPS Provinsi NTT, 2023).

Pemilihan variabel suku bunga, inflasi, dan nilai tukar dalam penelitian ini didasarkan pada peran ketiganya dalam kebijakan moneter yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja. Ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja, di mana suku bunga berpengaruh terhadap investasi dan kredit usaha di mana penurunannya dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, sementara kenaikannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi terutama di sektor pertanian dan UMKM yang dominan di NTT. Inflasi mempengaruhi daya beli dan biaya produksi, di mana inflasi yang tinggi dapat menekan usaha serta perekrutan tenaga kerja, sedangkan inflasi yang terkendali menciptakan stabilitas ekonomi. Nilai tukar berdampak pada biaya impor dan daya saing ekspor, sehingga fluktuasinya dapat mempengaruhi sektor produksi dan kesempatan kerja. Dengan demikian, analisis ketiga variabel ini penting untuk memahami dampak kebijakan moneter terhadap tenaga kerja di NTT.

Sebagian besar studi kebijakan moneter meneliti dampaknya pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dampaknya terhadap sektor riil di daerah berbasis sektor informal seperti NTT masih jarang diteliti (Warjiyo & Juhro, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *Error Correction Model* (ECM) untuk menganalisis bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi penyerapan

tenaga kerja di NTT dalam jangka pendek dan jangka panjang (MW & Enders, 1995)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai hubungan antara kebijakan moneter dan penyerapan tenaga kerja di NTT. Dengan analisis ECM, penelitian ini akan mengidentifikasi dampak kebijakan moneter terhadap sektor tenaga kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Nusa Tenggara Timur.

#### METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2018), metode ini didasarkan pada filsafat positivisme dan diterapkan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Biasanya, sampel diambil secara acak, data dikumpulkan menggunakan alat penelitian, dan analisis dilakukan secara statistik atau kuantitatif dengan tujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Menurut (Creswell & David Creswell, 2018) penelitian kuantitatif sering digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel dengan pengujian hipotesis statistik.

Data yang diperoleh melalui teknik dokumentasi umumnya merupakan data sekunder, sementara data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara biasanya merupakan data primer atau data yang didapat langsung dari sumber pertama.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi (Dokumentasi Sekunder) yaitu peneliti mengumpulkan data yang relevan dari sumber yang sudah ada, yang merupakan data kuantitatif yang diperlukan untuk analisis ECM pada sumber resmi Bank Indonesia dan World Bank yaitu data terkait kebijakan moneter (suku bunga, inflasi, dan nilai tukar) dan sumber resmi Badan Pusat Statistika NTT yaitu data penyerapan tenaga kerja (tingkat partisipasi angkatan kerja).

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif, di mana data yang digunakan berupa angka sehingga dapat diukur dan dihitung secara sistematis. Model analisis yang diterapkan adalah *Error Correction Model* (ECM), yang memungkinkan identifikasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara kebijakan moneter dan penyerapan tenaga kerja. Tahapan dalam metode ini meliputi Uji Stasioneritas (Uji Akar Unit), Uji Kointegrasi, serta estimasi ECM untuk melihat proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Selain itu, dilakukan Uji Asumsi Klasik, termasuk Uji Autokorelasi, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas guna memastikan validitas model yang digunakan serta pengujian hipotesis seperti Uji Parsial dan Uji Koefisien Determinan.

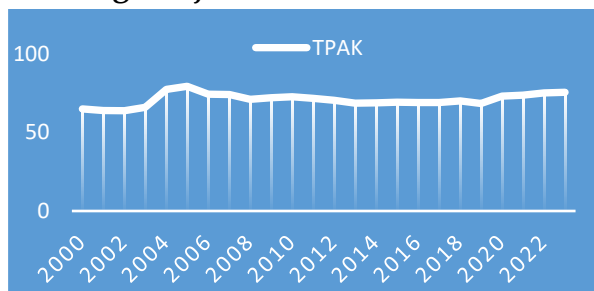
Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana perubahan

dalam kebijakan moneter yang tercermin dari fluktuasi suku bunga, inflasi, dan nilai tukar, berpengaruh terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di NTT. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Pada penelitian ini akan menganalisis hubungan antar variabel, apakah variabel independen (bebas) mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap variabel dependen (terikat).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ketenagakerjaan

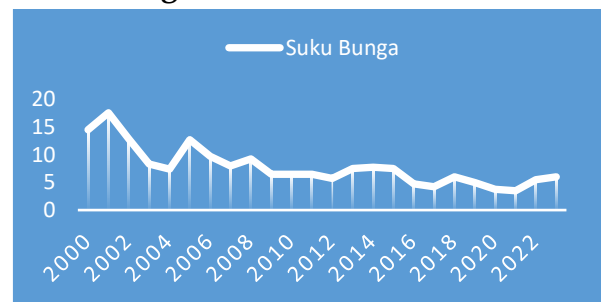


Nusa Tenggara Timur (NTT) mencatatkan kenaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2004-2005 sebesar 2,06%. Kenaikan ini didorong oleh meningkatnya partisipasi angkatan kerja di kalangan usia muda (15-19 tahun) dan lanjut usia (65 tahun ke atas) serta tren positif pada partisipasi perempuan. Meskipun demikian, peningkatan TPAK ini tidak sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang tercermin dari meningkatnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,46%. Selain itu, sebagian besar penduduk yang bekerja

masih berada dalam kondisi setengah pengangguran, terutama di sektor pertanian.

Kemudian, pada tahun 2008-2019 TPAK di NTT sendiri terus mengalami penurunan pada kisaran 11,2% dan kembali meningkat pada tahun 2020-2023 pada kisaran 7,22% yang disebabkan oleh fluktuatif akibat pandemi di awal tahun 2020, namun diperkirakan meningkat seiring pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Sektor pertanian yang dominan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

### Suku Bunga

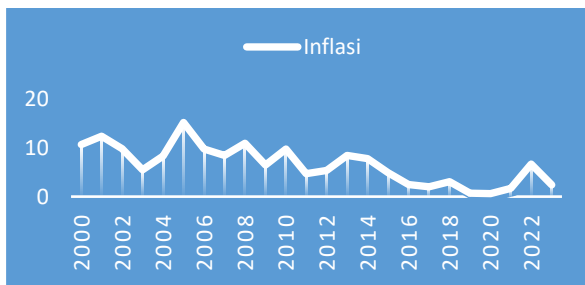


suku bunga di Indonesia mengalami fluktuasi pada 2000-2004 karena pemulihan dari krisis moneter 1998. Untuk menstabilkan suku bunga, Bank Indonesia memperkenalkan BI Rate sebagai acuan resmi di 2005. Setelah itu, kenaikan suku bunga terjadi lagi pada 2008 sebesar 2,46% akibat lonjakan inflasi karena kenaikan harga BBM yang sebelumnya berkisar 4.500 per liter menjadi 6.000 per liter, namun pada bulan desember harga BBM kembali menurun sebesar 5.000 per liter, lalu disertai gejolak ekonomi global dan lonjakan harga minyak mentah dunia yang mencapai rekor tertinggi pada saat itu.

Periode 2013-2015 diwarnai kenaikan

suku bunga sebesar 2% karena tekanan eksternal seperti kebijakan moneter AS yang melemahkan Rupiah, serta masalah domestik seperti defisit transaksi berjalan dan kenaikan harga BBM. Pada tahun 2018, kenaikan suku bunga sebesar 1,75% bertujuan menjaga nilai Rupiah dari ketidakpastian global dan kebijakan suku bunga Amerika Serikat (*The Fed*) yang secara agresif menaikkan suku bunga acuannya serta mendorong arus modal keluar dari negara-negara berkembang seperti Indonesia yang berakibat pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Terakhir, pada 2022-2023 suku bunga meningkat sebesar 2,5% disebabkan lonjakan inflasi global dan domestik yang mendorong Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga untuk mengendalikan harga dan menjaga nilai tukar Rupiah.

### Inflasi



Inflasi dari tahun 2000 hingga 2023 Nusa Tenggara Timur mengalami fluktuasi selama 23 tahun, dimulai dari tahun 2001 yang meningkat sebesar 1,72% dikarenakan kenaikan harga bahan makanan, potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang awalnya berkisar 1.150 per liter menjadi 1.450 per liter dan Tarif Dasar Listrik (TDL), serta dampak dari melemahnya nilai tukar Rupiah dan pemulihan ekonomi pasca

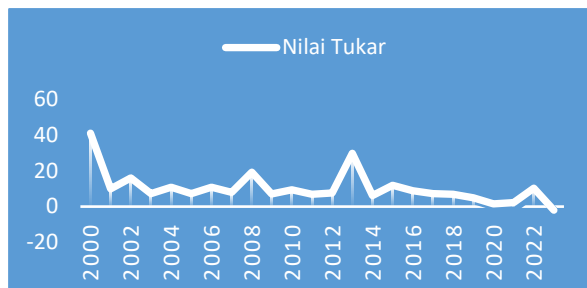
krisis moneter. Kemudian meningkat pada tahun 2005 (Maret dan Oktober) sebesar 6,51% dikarenakan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi secara nasional yang awalnya berkisar 2.400 per liter menjadi 4.500 per liter, yang kemudian berdampak pada kenaikan biaya transportasi dan harga barang serta jasa di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2008 terjadi lagi peningkatan inflasi sebesar 2,26% dikarenakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang meningkat yang awalnya berkisar 4.500 per liter menjadi 6.000 per liter. Dimana awalnya hanya untuk industri dan rumah tangga berkapasitas besar yang diperkirakan turut meningkatkan biaya produksi, namun pada akhirnya berdampak juga harga kebutuhan masyarakat.

Pada tahun 2010 inflasi meningkat 3,24% disebabkan oleh kenaikan harga pada kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, serta kelompok bahan makanan. Peningkatan inflasi tahun 2013 sebesar 3,08% lebih dipengaruhi oleh kenaikan tarif penerbangan yang terjadi setelah kenaikan harga avtur dan penyesuaian subsidi BBM yang disebabkan oleh kurangnya maskapai alternatif yang tersedia dan harga makanan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat karena didorong oleh kenaikan harga BBM yang awalnya 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter, dan disertai tarif penerbangan di NTT melonjak setelah pandemi dengan

tingginya permintaan dan terbatasnya penerbangan, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

### Nilai Tukar



Nilai Tukar pada tahun 2000 nilai tukar di Indonesia melemah karena warisan krisis ekonomi, ketidakseimbangan valas, eksekutif likuiditas Rupiah, instabilitas politik, dan aliran modal keluar. Pelemahan Rupiah tahun 2008 sebesar 11,83% terjadi karena krisis keuangan global yang memicu arus modal keluar dan kenaikan harga komoditas, serta diperparah sentimen negatif terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Pada tahun 2013 juga mengalami pelemahan rupiah sebesar 22,01% yang utamanya karena taper tantrum AS yang memicu arus modal keluar dan defisit neraca perdagangan Indonesia. Melemahnya nilai tukar Rupiah pada tahun 2022 sebesar 9,09% disebabkan oleh penguatan signifikan Dolar AS akibat kebijakan moneter agresif *The Federal Reserve* (kenaikan suku bunga) untuk mengatasi inflasi di Amerika Serikat dan ketidakpastian ekonomi global.

### Pengaruh Suku Bunga Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil estimasi jangka pendek dalam model *Error Correction Model* (ECM), tidak signifikannya

pengaruh suku bunga terhadap penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan melalui beberapa pertimbangan teoritis dan kontekstual. Dalam kerangka teori ekonomi makro, kebijakan moneter melalui instrumen suku bunga memang dikenal memiliki efek transmisi yang bersifat tidak langsung dan memerlukan waktu. Ketika suku bunga acuan mengalami perubahan, misalnya peningkatan suku bunga oleh bank sentral, respons pelaku ekonomi tidak terjadi secara instan. Dunia usaha, khususnya sektor riil, biasanya memerlukan waktu untuk menyesuaikan rencana investasinya. Proses pengajuan kredit, perencanaan produksi, hingga perekrutan tenaga kerja adalah kegiatan yang membutuhkan waktu, sehingga efek suku bunga terhadap aktivitas ketenagakerjaan lebih cenderung muncul dalam jangka menengah hingga panjang.

Selain itu, dalam konteks wilayah seperti Nusa Tenggara Timur yang struktur perekonomiannya masih didominasi oleh sektor informal dan pertanian tradisional, perubahan suku bunga tidak serta-merta memengaruhi perilaku pelaku usaha secara signifikan. Banyak usaha di NTT dijalankan secara mandiri atau berbasis rumah tangga tanpa bergantung pada pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Ketergantungan terhadap kredit modal kerja dari bank relatif rendah, sehingga fluktuasi suku bunga acuan cenderung tidak menjadi faktor penentu dalam keputusan produksi atau perekrutan tenaga kerja.

Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja di daerah ini lebih sensitif terhadap faktor musiman, proyek pemerintah (seperti program padat karya), serta dinamika sektor pertanian dan perikanan yang memiliki pola fluktuasi alami. Oleh karena itu, meskipun secara teori suku bunga dapat memengaruhi permintaan tenaga kerja melalui saluran investasi dan konsumsi, dalam praktik jangka pendek hal tersebut sulit teramati secara nyata di wilayah yang struktur ekonominya belum terlalu terdiferensiasi.

Faktor penting lainnya adalah keberadaan rigiditas harga dan upah dalam jangka pendek. Dalam banyak kasus, pasar tenaga kerja tidak fleksibel dalam merespons perubahan suku bunga secara cepat karena adanya kontrak kerja, struktur birokrasi ketenagakerjaan, dan keterbatasan mobilitas tenaga kerja. Perusahaan cenderung menahan diri untuk merekrut atau memberhentikan pekerja dalam jangka pendek hanya karena perubahan biaya pinjaman. Hal ini memperkuat argumen bahwa perubahan suku bunga lebih berfungsi sebagai sinyal kebijakan jangka panjang, bukan sebagai instrumen reaktif untuk mengubah situasi ketenagakerjaan secara langsung dan cepat.

Hasil penelitian yang menunjukkan ketidakberpengaruhannya suku bunga dalam jangka pendek sejalan dengan pandangan Keynesian tentang *liquidity trap* atau kondisi di mana penurunan suku bunga lebih lanjut tidak mampu mendorong investasi. Namun, dalam jangka waktu yang lebih panjang,

pengaruh suku bunga menjadi lebih nyata sebagaimana diprediksi oleh model-model klasik dan neoklasik dengan asumsi pasar yang lebih fleksibel.

Hasil yang diperoleh sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh, di mana variabel Suku bunga yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian yang diperoleh (Selvianti, 2023) diketahui nilai  $t$  probabilitas (0,822) lebih besar dari taraf nyata sebesar 0,05. Karena  $Sig > 0,05$  maka  $H_2$  diterima yang artinya tidak terdapat pengaruh antara Tingkat Suku Bunga di Indonesia terhadap penyerapan tenaga kerja.

Menurut Hanifata (2018) juga menunjukkan bahwa suku bunga Tidak berpengaruh signifikan dalam jangka pendek dan jangka panjang terhadap penyerapan tenaga kerja karena diketahui Hasil Uji Validitas Pengaruh (Uji  $t$ ) pada variabel suku bunga hanya mendapat nilai probabilitas  $0.0254 < 0,05$ . Yang artinya  $H_0$  di tolak karena suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.

Dalam jangka panjang, suku bunga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena mekanisme transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga bekerja secara bertahap dan memerlukan waktu untuk memengaruhi variabel-variabel riil dalam perekonomian. Dalam jangka panjang, dunia usaha memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan rencana

bisnisnya, memperluas kapasitas produksi, dan merekrut tenaga kerja tambahan seiring dengan membaiknya ekspektasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, turunnya suku bunga dalam jangka panjang juga dapat mendorong konsumsi rumah tangga melalui peningkatan ketersediaan kredit konsumsi, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan barang dan jasa serta mendorong perusahaan untuk menambah tenaga kerja guna memenuhi lonjakan permintaan tersebut.

Dengan kata lain, suku bunga yang rendah secara berkelanjutan menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan output dan ekspansi sektor riil, sehingga memperkuat penyerapan tenaga kerja secara struktural. Maka dari itu, pengaruh suku bunga terhadap penyerapan tenaga kerja cenderung lebih nyata dan kuat dalam jangka panjang dibandingkan dalam jangka pendek.

Secara teori, dalam jangka waktu yang lebih panjang, pengaruh suku bunga menjadi lebih nyata sebagaimana diprediksi oleh model-model klasik dan neoklasik dengan asumsi pasar yang lebih fleksibel. Hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara suku bunga dan penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang mengimplikasikan bahwa biaya modal memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan terkait investasi dan perekrutan.

Dalam penelitian ini, Teori Dana Pinjaman dan Teori Preferensi Likuiditas

tampak menjadi kandidat terkuat untuk menjelaskan fenomena ini. Teori Dana Pinjaman menyoroti bagaimana tingkat suku bunga mencerminkan ketersediaan dana untuk investasi, dimana pada saat suku bunga tinggi dapat mengindikasikan terbatasnya dana pinjaman relatif terhadap permintaan, sehingga meningkatkan biaya modal dan berpotensi menghambat investasi jangka panjang serta penciptaan lapangan kerja (Nopirin, 1998).

Sementara itu, Teori Preferensi Likuiditas berpendapat bahwa preferensi masyarakat untuk memegang uang tunai dapat memengaruhi suku bunga, dimana jikalau preferensi likuiditas tinggi secara konsisten dapat mendorong suku bunga naik, dan jika biaya pinjaman yang berkelanjutan tinggi maka dapat menghambat ekspansi bisnis dan penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang (Nopirin, 1998).

Hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang dimiliki (Malika, 2013) di mana penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara suku bunga dan penyerapan tenaga kerja. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kenaikan suku bunga sebesar satu persen berkorelasi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0,006 persen.

Pengaruh suku bunga terhadap penyerapan tenaga kerja antara jangka pendek dan jangka panjang dapat dipahami melalui interaksi antara teori-teori suku bunga dan mekanisme transmisi kebijakan moneter yang

dipengaruhi oleh karakteristik pasar keuangan dan tenaga kerja (Mishkin, 2007). Dalam jangka pendek, Teori Preferensi Likuiditas menyoroiti potensi kegagalan suku bunga karena berbagai hambatan dan ekspektasi yang dominan dalam pengambilan keputusan ekonomi (Keynes dkk., 2023). Sementara itu, dalam jangka panjang, Teori Dana Pinjaman memberikan landasan di mana suku bunga memainkan peran yang lebih fundamental dalam mengalokasikan sumber daya dan mempengaruhi investasi, yang pada akhirnya berdampak pada penyerapan tenaga kerja seiring dengan penyesuaian pasar (Nopirin, 1998).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak signifikannya pengaruh suku bunga terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek mencerminkan keterbatasan efektivitas kebijakan moneter melalui saluran suku bunga di wilayah seperti NTT, serta menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan alternatif, seperti kebijakan fiskal dan program ketenagakerjaan langsung untuk mendorong penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek secara lebih nyata dan terarah.

### **Pengaruh Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan teori Kurva

Phillips yang menyatakan adanya *trade-off* antara tingkat inflasi dan pengangguran. Secara sederhana, ketika inflasi meningkat, pengangguran cenderung menurun karena kenaikan harga mencerminkan meningkatnya permintaan agregat (Mankiw, 2006).

Dalam situasi ini, perusahaan akan melihat adanya peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa, yang kemudian mendorong mereka untuk meningkatkan kapasitas produksi. Untuk memenuhi kebutuhan produksi tersebut, perusahaan akan menambah jumlah tenaga kerja, sehingga penyerapan tenaga kerja akan meningkat. Fenomena ini banyak terjadi ketika perekonomian sedang berada dalam fase ekspansi, di mana peningkatan konsumsi dan investasi mendorong kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam tahap awal kenaikan inflasi, aktivitas ekonomi cenderung tumbuh dan mendorong terciptanya lapangan kerja baru, sejalan dengan apa yang diprediksi oleh Kurva Phillips (Nanga, 2001).

Namun, ketika dikaitkan dengan kondisi empiris di Indonesia, khususnya dalam jangka pendek, hubungan antara inflasi dan penyerapan tenaga kerja tidak selalu berjalan secara langsung sebagaimana yang dijelaskan dalam teori. Hal ini dibuktikan ketika inflasi naik terlalu tinggi dan melampaui batas yang dianggap aman oleh otoritas moneter (misalnya target inflasi Bank Indonesia sebesar  $3 \pm 1\%$ ), maka inflasi tidak lagi dianggap sebagai tanda ekspansi

ekonomi yang sehat, melainkan sebagai indikator ketidakseimbangan ekonomi. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan tetap dan miskin.

Selain itu, inflasi yang tidak terkendali dapat menimbulkan ekspektasi inflasi di masa depan, di mana pelaku usaha dan pekerja mulai mengantisipasi kenaikan harga lebih lanjut melalui permintaan upah dan penyesuaian harga. Situasi ini dapat mengarah pada spiral inflasi yang berbahaya. Oleh karena itu, pemerintah melalui Bank Indonesia akan melakukan intervensi untuk meredam inflasi melalui kebijakan moneter kontraktif. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat dalam jangka pendek.

Kebijakan moneter kontraktif dilakukan dengan cara menaikkan suku bunga acuan (seperti BI Rate/BI7DRR), memperketat pasokan uang, dan mengendalikan pertumbuhan kredit. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya biaya pinjaman bagi dunia usaha dan rumah tangga. Perusahaan yang semula ingin berekspansi menjadi lebih berhati-hati karena beban bunga meningkat. Kredit investasi juga menjadi mahal, sehingga rencana ekspansi usaha ditunda atau dibatalkan. Konsumsi rumah tangga pun ikut menurun karena bunga kredit konsumtif meningkat dan tekanan inflasi menyebabkan daya beli masyarakat menurun (Utomo, 2013).

Secara keseluruhan, permintaan agregat melemah dan perusahaan merespons dengan mengurangi produksi atau bahkan melakukan efisiensi biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja. Akibatnya, meskipun sebelumnya inflasi mendorong penyerapan tenaga kerja, kebijakan pengetatan justru membalikkan efek tersebut, menyebabkan perlambatan penciptaan lapangan kerja dan bahkan peningkatan pengangguran.

Intervensi ini pada dasarnya menjadi faktor eksternal yang tidak dimasukkan secara eksplisit dalam model estimasi yang digunakan dalam penelitian ini. Akibatnya, hubungan yang ditemukan dalam penelitian ini lebih menggambarkan kondisi *ceteris paribus*, yakni ketika variabel-variabel lain dianggap konstan, termasuk tidak adanya intervensi kebijakan. Dengan kata lain, dalam kondisi normal tanpa intervensi yang agresif, inflasi memang memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, sebagaimana tercermin dalam hasil estimasi model *Error Correction Model* (ECM) yang digunakan.

Hasil dalam jangka pendek ini selaras dengan penelitian (Anwar, 2021) yang diketahui hasil uji parsial menunjukkan probabilitas nilai signifikansi variabel inflasi sebesar  $0,000 < 0,05$  dengan nilai koefisien sebesar  $-0,147$ . Karena jika inflasi tidak terkendali dan mencapai tingkat yang terlalu tinggi, kondisi ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja. Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi memiliki

pengaruh negatif signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Pada penelitian (Quynh, 2021) diketahui Inflasi secara parsial mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dengan nilai koefisien sebesar -0.004. Hasil ini menunjukkan jika tingkat inflasi meningkat sebesar satu persen maka jumlah penyerapan tenaga kerja akan menurun sebesar 0.4%.

Dalam jangka panjang, inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja karena jika inflasi berlangsung secara terus-menerus maka hal tersebut akan memengaruhi daya beli, biaya produksi, ekspektasi pelaku ekonomi, dan stabilitas makroekonomi secara keseluruhan. Ketika inflasi berlangsung pada tingkat yang tinggi dan tidak terkendali dalam jangka panjang, nilai riil pendapatan masyarakat akan menurun, sehingga konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen utama dalam permintaan agregat akan melemah.

Permintaan yang menurun ini akan mengurangi insentif bagi perusahaan untuk meningkatkan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada pembatasan perekrutan tenaga kerja atau bahkan pemutusan hubungan kerja. Selain itu, inflasi yang tinggi juga mendorong kenaikan biaya input seperti bahan baku dan upah, terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Akibatnya, beban biaya perusahaan meningkat, profitabilitas menurun, dan dunia usaha menjadi lebih

berhati-hati dalam melakukan ekspansi usaha maupun membuka lapangan kerja baru.

Sebaliknya, dalam kondisi inflasi yang stabil dan terkendali dalam jangka panjang, pelaku usaha dapat menyusun rencana produksi dan investasi dengan lebih pasti karena adanya prediktabilitas harga. Stabilitas harga menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan tenaga kerja secara struktural.

Dalam jangka pendek, efek inflasi terhadap pasar tenaga kerja cenderung bersifat nominal dan temporer, seperti penyesuaian upah atau harga, namun dalam jangka panjang, pengaruhnya lebih mendalam karena menyangkut struktur biaya, ekspektasi jangka panjang pelaku ekonomi, dan potensi pertumbuhan riil perekonomian. Oleh karena itu, inflasi menjadi faktor penting yang secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi penyerapan tenaga kerja dalam jangka panjang, baik melalui saluran konsumsi, investasi, maupun stabilitas makroekonomi secara keseluruhan.

Hasil dalam jangka panjang selaras dengan penelitian (Ardiawan & Utama, 2024) Inflasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di provinsi-provinsi di Indonesia. Hasil penelitian ini memiliki arti bahwa ketika inflasi meningkat, PDRB per kapita meningkat, dan upah minimum riil juga meningkat,

maka akan terjadi peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja di Provinsi-provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun teori Kurva Phillips menjelaskan bahwa inflasi dalam jangka pendek dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efek ini tidak berlangsung lama dan sangat tergantung pada respon kebijakan pemerintah. Dalam banyak kasus, pemerintah lebih memilih mengendalikan inflasi daripada mempertahankan pertumbuhan tenaga kerja yang tidak berkelanjutan. Alur pemikiran ini juga menunjukkan bahwa hubungan inflasi dan penyerapan tenaga kerja bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk ekspektasi pelaku ekonomi, penyebab inflasi (apakah karena permintaan atau biaya), serta instrumen kebijakan yang digunakan.

Sedangkan dalam jangka panjang, pengaruh inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan karena dalam jangka panjang, intervensi kebijakan bersifat temporer dan efek inflasi yang akumulatif tetap berpengaruh terhadap keputusan produksi dan ketenagakerjaan di sektor riil. Oleh karena itu, hasil ini tetap relevan secara teoritis dan empiris, namun perlu dimaknai dengan mempertimbangkan konteks kebijakan ekonomi makro di Indonesia yang responsif terhadap dinamika inflasi, terutama dalam jangka pendek.

### **Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja**

Berdasarkan hasil analisis mengindikasikan adanya korelasi antara nilai tukar dan penyerapan tenaga kerja dalam panjang, namun dalam jangka pendek variabel nilai tukar dan penyerapan tenaga kerja tidak memiliki korelasi. Dalam jangka pendek nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, hal ini mencerminkan bahwa fluktuasi nilai tukar belum mampu secara langsung mendorong perubahan dalam penciptaan lapangan kerja atau peningkatan partisipasi angkatan kerja. Secara teoritis, perubahan nilai tukar, khususnya depresiasi (pelemahan mata uang domestik terhadap mata uang asing seperti USD), seharusnya mendorong ekspor karena harga barang domestik menjadi relatif lebih murah di pasar internasional.

Kenaikan ekspor ini seharusnya dapat meningkatkan produksi yang pada akhirnya memperbesar permintaan terhadap tenaga kerja. Namun, dalam jangka pendek, alur transmisi ini sering kali tidak berjalan dengan efektif, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural seperti rigiditas pasar tenaga kerja, keterbatasan infrastruktur ekspor, dominasi sektor informal, dan tingginya ketergantungan terhadap barang impor, termasuk bahan baku dan barang modal.

Kemudian ketika terjadi depresiasi nilai tukar, perusahaan domestik yang

bergantung pada bahan baku impor justru menghadapi peningkatan biaya produksi, sehingga bukannya menambah tenaga kerja, mereka cenderung menahan ekspansi atau bahkan melakukan efisiensi, yang bisa berarti tidak membuka lowongan baru atau bahkan melakukan pengurangan tenaga kerja. Selain itu, di banyak daerah di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Timur (NTT), yang struktur ekonominya masih sangat bergantung pada sektor pertanian subsisten dan informal serta tidak banyak terlibat dalam perdagangan internasional ini mengakibatkan perubahan nilai tukar tidak serta-merta memengaruhi keputusan produksi dan perekrutan tenaga kerja. (Widina, 2017)

Di sisi lain, kondisi seperti lemahnya daya saing produk ekspor, terbatasnya diversifikasi industri, serta minimnya insentif bagi sektor padat karya untuk berekspansi, turut menjelaskan mengapa nilai tukar belum berdampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam horizon waktu yang singkat.

Dalam teori ekonomi, ketidaksignifikanan nilai tukar terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek ini sejalan dengan pandangan teori *Purchasing Power Parity* (PPP) yang tidak sepenuhnya berlaku dalam jangka pendek. Teori PPP menyatakan bahwa nilai tukar antar mata uang seharusnya mencerminkan perbedaan tingkat harga antar negara, sehingga dalam jangka panjang nilai tukar akan bergerak menuju keseimbangan yang menjaga daya beli relatif antar negara.

Artinya, dalam jangka panjang, depresiasi rupiah semestinya meningkatkan daya saing harga produk di Indonesia, mendorong ekspor, menumbuhkan produksi, dan memperluas lapangan kerja. Namun dalam praktiknya, teori PPP tidak berlaku secara langsung di jangka pendek karena berbagai hambatan seperti kontrol harga, subsidi pemerintah, intervensi bank sentral, dan waktu yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi untuk menyesuaikan ekspektasi dan perilakunya terhadap perubahan nilai tukar.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Wibowo, 2013) yang menunjukkan dari sisi peranan ekspor dalam penyerapan tenaga kerja bahwa total ekspor mengalami penurunan sebesar 6,6% dan 5,5% nya pada ekspor non migas. Penurunan sebesar 5,5% tersebut mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja sebesar 549 ribu orang. Kondisi tersebut juga berakibat pada peningkatan angka pengangguran.

Hasil analisis dalam jangka panjang berbeda dengan jangka pendek, di mana hubungan antara nilai tukar dan penyerapan tenaga kerja bisa menjadi lebih nyata dan signifikan. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, perusahaan memiliki waktu untuk menyesuaikan struktur biaya dan strategi produksinya, misalnya dengan mencari substitusi bahan baku lokal, meningkatkan efisiensi, atau melakukan ekspansi ke pasar ekspor.

Jika depresiasi rupiah bersifat

berkelanjutan dan didukung oleh kebijakan yang memperkuat sektor ekspor dan industri padat karya, maka akan terbentuk efek multiplier terhadap perekonomian yang mencakup peningkatan output, pendapatan, dan akhirnya penyerapan tenaga kerja. Dengan kata lain, hubungan antara nilai tukar dan pasar tenaga kerja baru akan tampak secara signifikan dalam jangka panjang, ketika hambatan-hambatan struktural telah diatasi dan insentif ekonomi telah termobilisasi secara optimal. (Goyal, 2014)

Dalam jangka panjang, hal ini sejalan dengan teori *Purchasing Power Parity* (PPP) yang menyatakan bahwa nilai tukar dalam jangka panjang mencerminkan perbedaan daya beli antarnegara. Depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan harga barang impor, mendorong konsumsi produk lokal, dan memperkuat daya saing sektor-sektor domestik seperti pertanian dan industri kecil. Peningkatan aktivitas ekonomi ini kemudian mendorong permintaan tenaga kerja dan berdampak positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja.

Dalam jangka panjang, meskipun PPP dianggap sebagai kekuatan penyeimbang yang mendorong nilai tukar untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan tingkat inflasi antar negara, implikasinya terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat lebih struktural. Jika suatu negara secara berlanjut mempertahankan nilai tukar yang *undervalued* (lebih rendah dari tingkat

PPP), sektor ekspornya dapat menikmati keuntungan kompetitif yang berkelanjutan, yang berpotensi mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor tersebut dalam jangka panjang.

Sebaliknya, nilai tukar yang *overvalued* secara berlanjut dapat menghambat sektor ekspor dan mendorong impor, yang berpotensi menekan produksi domestik dan penyerapan tenaga kerja di sektor-sektor yang bersaing dengan impor. Akan tetapi, PPP itu sendiri tidak menyediakan mekanisme secara langsung yang menghubungkan nilai tukar dengan pasar tenaga kerja (Sitompul & Siahaan, 2020).

Hasil analisis ini sejalan dengan penelitian (Pamungkas M, 2018) dimana variabel kurs (*Exchange Rate*) berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja melalui media investasi di ASEAN. Dalam penelitian ini juga menyatakan bahwa pemerintah di setiap negara harus bisa menjaga kestabilan nilai tukarnya terhadap US Dollar agar tidak menurun terlalu tajam, walaupun nilai tukar yang rendah menjadi daya tarik tersendiri bagi investor asing.

Selain itu, pada penelitian (Sahrul dkk., 2023) juga menunjukkan dimana ekspor dan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek, kedua variabel tersebut

tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam kasus di Indonesia secara keseluruhan, dan khususnya di daerah seperti NTT, ketidaksignifikanan nilai tukar terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek menunjukkan perlunya reformasi struktural dan pembangunan sektor produktif yang lebih terintegrasi dengan pasar internasional. Hal ini mencakup peningkatan infrastruktur, pemberdayaan UMKM untuk ekspor, pengembangan sektor padat karya, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia agar siap menghadapi dinamika global.

Dengan demikian, agar nilai tukar dapat berperan sebagai instrumen transmisi kebijakan ekonomi yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja, diperlukan sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, serta kebijakan sektoral yang berorientasi pada transformasi ekonomi jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis dari data, jurnal dan teori yang di jabarkan dapat di simpulkan bahwa nilai tukar tidak berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek, namun berpengaruh dalam jangka panjang. Sesuai teori *Purchasing Power Parity* (PPP), nilai tukar mencerminkan daya beli antarnegara dalam jangka panjang. Depresiasi nilai tukar dapat mendorong konsumsi produk lokal dan meningkatkan daya saing sektor ekspor, sehingga berkontribusi terhadap

peningkatan penyerapan tenaga kerja secara struktural.

### SIMPULAN

Suku bunga tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek, namun memiliki pengaruh yang berarti dalam jangka panjang. Ketidakefektifan jangka pendek ini disebabkan oleh keterlambatan transmisi kebijakan moneter, struktur ekonomi lokal yang didominasi sektor informal, serta rigiditas pasar tenaga kerja. Di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), pengaruh suku bunga cenderung teredam karena rendahnya ketergantungan terhadap pembiayaan formal dan tingginya sensitivitas terhadap faktor musiman. Sebaliknya, dalam jangka panjang, suku bunga dapat memengaruhi penyerapan tenaga kerja melalui dampaknya terhadap investasi, sebagaimana dijelaskan oleh Teori Dana Pinjaman dan Teori Preferensi Likuiditas.

Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan Kurva Phillips yang menyatakan adanya hubungan terbalik antara inflasi dan pengangguran. Namun, dalam praktiknya, terutama di Indonesia, dampak positif inflasi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek bersifat terbatas dan sangat tergantung pada respons kebijakan moneter. Ketika inflasi melebihi batas wajar, bank sentral cenderung merespons

dengan kebijakan kontraktif yang justru melemahkan permintaan agregat dan menurunkan penyerapan tenaga kerja. Dalam jangka panjang, pengaruh inflasi lebih stabil karena efek intervensi bersifat sementara dan proses penyesuaian sektor riil tetap berlangsung.

Nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dalam jangka pendek, namun memiliki hubungan yang lebih nyata dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, mekanisme transmisi dari depresiasi nilai tukar ke peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja tidak berjalan efektif akibat berbagai hambatan struktural, seperti dominasi sektor informal, ketergantungan pada impor, dan lemahnya konektivitas dengan pasar global. Hal ini selaras dengan teori *Purchasing Power Parity* (PPP) yang lebih relevan dalam jangka panjang dibanding jangka pendek. Dalam jangka panjang, depresiasi nilai tukar yang didukung oleh reformasi struktural dan kebijakan industri dapat mendorong ekspor, menstimulasi produksi, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anamathofani, A. L. (2019). Pengaruh Upah Minimum, Pdrb, Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah*, 1-20.
- Arida, A., Zakiah, & Juliani. (2015). Analisis Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Pada Sektor Pertanian Di Provinsi Aceh. *Agrisep*, 16(1).
- Arjunita, C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 5(2), 137. <https://doi.org/10.24036/Ecosains.11065357.00>
- Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara. (2023). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (Tpak) Laki-Laki+Perempuan Menurut Kabupaten Kota (Perkotaan+Pedesaan). Diambil Dari <https://ntt.bps.go.id/indicator/6/538/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-tpak-menurut-kabupaten-kota.html>
- Blanchard, O. (2020). *Macroeconomics* (8 Ed.). Boston, Massachusetts: Pearson Education.
- Boediono. (2001). *Indonesia Menghadapi Ekonomi Global*. Yogyakarta: Seri Perekonomian Indonesia.
- Boediono. (2017). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi Bpfe.
- Case, K. E., & Fair, R. C. (2007). *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Collins, J., & Broten, N. (2017). *The Role Of Monetary Policy*. The Role Of Monetary Policy. Taylor And Francis. <https://doi.org/10.4324/9781912281091>
- Cooper, R. N., & Krugman, P. R. (1999). The Return Of Depression Economics. *Foreign Affairs*, 78(4), 126. <https://doi.org/10.2307/20049375>
- Creswell, J. W., & David Creswell, J. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 53.

- De Pedro, C. (1970). *Macroeconomics*. Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer Y Richard Startz Mcgraw-Hill Higher Education, 2011. Papeles De Europa, 27(1).  
[https://doi.org/10.5209/Rev\\_Pa de.2014.V27.N1.47067](https://doi.org/10.5209/Rev_Pa de.2014.V27.N1.47067)
- Dornbusch, R., & Fischer, S. (1994). *Macroeconomics*. New York: Mcgraw-Hill.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (2015). Co-Integration And Error Correction: Representation, Estimation, And Testing. *Applied Econometrics*, 39(3).  
<https://doi.org/10.2307/1913236>
- Febriyanti, S., Dwiyantri, A., & Mangara, T. H. (2024). PENGARUH HUMAN CAPITAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN MANAJERIAL TERKAIT PERNIKAHAN. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 3(1), 1-14.  
<https://doi.org/10.58290/jmbo.v3i1.243>
- Feriyanto, N. (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Indonesia*. *Reproductive Health Matters*, 44(1).
- Friedman, M. (1968). The Role Of Monetary Policy. *The American Economic Review*, 58, No. 1.
- Gordon, R. J., & Solow, R. M. (2009). Can The Inflation Of The 1970s Be Explained? Dalam *Productivity Growth, Inflation, And Unemployment* (Hlm. 367-388). Cambridge University Press.  
<https://doi.org/10.1017/Cbo9780511616587.021>
- Goyal, A. (2014). Purchasing Power Parity, Wages And Inflation In Emerging Markets. *Foreign Trade Review*, 49(4).  
<https://doi.org/10.1177/0015732514543587>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika (Terjemahan)*. Buku Edisi 5. Salemba. Jakarta.
- Hair Jr., J. F., Anderson, R. E., Babin, B. J., & Black, W. C. (2019). *Multivariate Data Analysis, Multivariate Data Analysis*. Book (Vol. 87).
- Hardani, Ustiawaty, J., Andriani, H., Fatmi Utami, E., Rahmatul Istiqomah, R., Asri Fardani, R., ... Hikmatul Auliya, N. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Dalam Yogyakarta: Cv. Pustaka Ilmu (Hlm. 63).
- Hubbard, G., O'brien, A., & Rafferty, M. (2012). *Macroeconomics*. New Jersey.
- Keynes, B., Tarmizi, H., & Yuliaty, T. (2023). Analysis Of The Influence Of Economic Growth, Inflation And Unemployment On Poverty In The Regencies/Cities Of North Sumatra Province. *International Journal Of Research And Review*, 10(7), 110-123.  
<https://doi.org/10.52403/Ijrr.20230717>
- Krugman, P., Obstfeld, M., & Melitz, M. (2021). *International Economics: Theory And Policy* (12 Ed.). Boston, Massachusetts.
- Mahadika, H., & Wibowo, W. (2021). The Effect Of Monetary Policy On Unemployment Rate In Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(1), 1.  
<https://doi.org/10.20473/Jiet.V6i1.27100>
- Mankiw, G. (2006). *Makroekonomi*, Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Maski, G., & Satria, D. (2004). Asosiasi Antara Kurs Dan Harga Saham Dengan Error Correction Model

- (Studi Periode 2000-2003). *Tema*, 5(1), 23-35.
- Miftahul Arif, M., Eka Rahayu, A., Nofiana, D., & Qistina. (2023). PENGARUH BIAYA TENAGA KERJA LANGSUNG DAN KOS BARANG TERJUAL TERHADAP LABA BERSIH PADA PERUSAHAAN SEKTOR ANEKA INDUSTRI YANG TERDAFTAR DI INDEKS SAHAM SYARIAH INDONESIA PERIODE 2017-2021. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi*, 2(1). <https://doi.org/10.58290/jmbo.v2i1.91>
- Mishkin, F. (2007). *The Economics Of Money, Banking, And Financial Markets*. Boston.
- Mulyadi; (2014). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan / Mulyadi*. Rajagrafindo Persada.
- Mw, & Enders, W. (1995). *Applied Econometric Time Series*. *Journal Of The American Statistical Association*, 90(431), 1135. <https://doi.org/10.2307/2291367>
- Nachrowi, N. D. Dan H. U. (2006). *Pendekatan Populer Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fe Ui, 14(4).
- Nanga, M. (2001). *Makro Ekonomi Teori, Masalah Dan Kebijakan Edisi Pertama*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Nopirin. (1998). *Ekonomi Moneter (Edisi 1)*. BPFE. Yogyakarta.
- Pamungkas M. (2018). *Penyerapan Tenaga Kerja Di Asean Countries*.
- Pane, S., Fernanda, R., Althaaf, S., Waruru, T., & Silalahi, M. (2024). Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.
- Perry, W., & Solikin. (2003). *Kebijakan Moneter Di Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Pohan, A. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Quynh, L. N. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia (Kajian Pada Masa Covid-19).
- Rahardja, P., & Manurung, M. (2008). *Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi Dan Makroekonomi*. Jakarta.
- Sahrul, S., Metekhoy, S., Pattilouw, D. R., & Sangadji, M. (2023). Dampak Keterbukaan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia Tahun 1993-2022. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(3), 1785-1799. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i3.1242>
- Salvatore, D. (2013). *International Economics (11th Edition)*. *Journal Of Chemical Information And Modeling (Vol. 53)*.
- Samuelson, P., & Nordhaus, W. (2010). *Economics*. New York.
- Sang Ketut Ari Ardiawan, & Made Suyana Utama. (2024). Pengaruh Inflasi, Pdrb, Dan Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Journal Of Business, Finance, And Economics (Jbfe)*, 5(1), 172-198. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i1.5133>
- Sardjonopermono, I. (2016). Kebijakan Moneter: Teori Dan Bukti Empiris. *Economic Journal Of Emerging Markets*, 53-66.

- <https://doi.org/10.20885/Ejem.V3i1.6847>
- Sasana, H. (2012). Kajian Desentralisasi Fiskal Terhadap Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jejak (Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan)*, 5(1).  
<https://doi.org/10.15294/Jejak.V5i1.4630>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Dalam *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Dalam 2 (Hlm. 136).
- Setiono, F. (2018). Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Investasi Di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2007 - 2016. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Sholeh, M. (2012). Permintaan Dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 4(1).  
<https://doi.org/10.21831/Jep.V4i1.618>
- Sitompul, N., & Siahaan, M. (2020). Analisis Pengaruh Nilai Tukar Dan Inflasi Terhadap Neraca Perdagangan Di Indonesia 2008 - 2018. *Visi Sosial Humaniora*, 1(1).  
<https://doi.org/10.51622/Vsh.V1i1.21>
- Sudarsono, H. (2004). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*. Yogyakarta.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan - Google Buku*. Dalam Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi Teori Pengantar (3 Ed.)*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Taylor, J. (2017). *Rules Versus Discretion: Assessing The Debate Over The Conduct Of Monetary Policy*. National Bureau Of Economic Research.
- Utomo, F. W. (2013). Pengaruh Inflasi Dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 1(2), 1-22.
- Warjiyo, P. (2004). *Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter Di Indonesia*.
- Warjiyo, P., & Juhro, S. (2019). *Central Bank Policy: Theory And Practice*.
- Wibowo, T. (2013). Dampak Penurunan Ekspor Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2), 171-192. Diambil Dari <https://jurnal.kemendag.go.id/Bilp/Article/View/112>
- Widarjono, A. (2013). *Ekonometrika: Pengantar Dan Aplikasinya (4 Ed.)*. Yogyakarta: Penerbit Ykpn.
- Widina. (2017). *Ekonomi Moneter. Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5*. Bpfe-Yogyakarta.
- Widyaningsih, A. T., Sani, S., Suseno, J., & Murdiani, A. M. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Integra*, 14(1), 53.  
<https://doi.org/10.51195/Iga.V14i1.340>